

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DI INDONESIA: ANALISIS SDGs 4

Riris Lawitta Maulina Siahaan¹, Juli Arianti², Najdah Thalib³
^{1, 2, 3}Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama, Merauke, Indonesia
Email: rirlawitta@gmail.com

Article History

Received: 28-09-2023

Revision: 06-10-2023

Accepted: 07-10-2023

Published: 08-10-2023

Abstract. Sustainable Development Goals (SDGs) are a major topic in the global development agenda discussed by United Nations (UN) member states in Rio De Janeiro, with the aim of replacing the Millennium Development Goals (MDGs). One of the fourteen goals in the SDGs is to ensure equitable and inclusive quality education and increase lifelong learning opportunities for all individuals. This study aims to track the development of education in Indonesia to achieve the SDGs target, namely in building a quality education system and providing fair learning opportunities to all citizens. This study used a descriptive method. The results show that education development indicators in Indonesia continue to show improvement from year to year, thanks to government policies in the education sector, but there are still some challenges that need to be overcome.

Keywords: SDGs 4, Quality Education, Learning Opportunities

Abstrak. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan topik utama dalam agenda pembangunan global yang dibahas oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Rio De Janeiro, dengan tujuan menggantikan Millennium Development Goals (MDGs). Salah satu dari empat belas tujuan dalam SDGs adalah untuk memastikan kualitas pendidikan yang adil dan inklusif, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hidup bagi semua individu. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri perkembangan pendidikan di Indonesia dalam upaya mencapai sasaran SDGs, yakni dalam membangun sistem pendidikan berkualitas dan memberikan kesempatan belajar yang adil kepada seluruh warga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil data menunjukkan bahwa indikator pembangunan pendidikan di Indonesia terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun, berkat kebijakan-kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Kata Kunci: SDGs 4, Pendidikan Berkualitas, Kesempatan Belajar

How to Cite: Siahaan, R. L. M., Arianti, J., & Thalib, N. (2023). Perkembangan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis SDGs 4. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4 (2), 975-985. <http://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.316>.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Pendidikan dalam arti luas ialah proses pengetahuan belajar yang berlangsung sepanjang hayat (*long life*) pada semua tempat dan situasi

yang memberikan dampak positif pada suatu individu (Desi Pristiwanti et al., 2022). Pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui pendidikan karena pendidikan merupakan sarana untuk mengubah persepsi, sikap dan perilaku manusia (Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, 2010)

PBB melalui Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD) (2005-2014) dalam Agenda 21 menilai bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, dimana pendidikan lebih dari sekedar pengetahuan dan *skills* tetapi juga meliputi pandangan yang mendunia, nilai-nilai, perspektif, dan aspirasi (Charles Hopkins & Rosalyn McKeown, 2002). Pelaksanaan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang selesai pada tahun 2015 berlanjut dengan era pembangunan baru yang dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Terdapat berbagai diskusi yang telah dilakukan untuk mencakup pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan. Jenis pembangunan ini memperhitungkan prinsip-prinsip seperti partisipasi, kesetaraan, serta upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kerjasama global (United Nations, 2014). UNESCO telah merumuskan Agenda 2030 untuk SDGs sebagai sebuah kesepakatan pembangunan yang mendorong perubahan berdasarkan HAM dan kesetaraan, dengan tujuan mendorong kemajuan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. UNESCO juga turut mempromosikan kebijakan pendidikan dan praktek yang dapat membantu mengatasi tantangan global dengan mempromosikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan,

UNESCO berusaha untuk memastikan bahwa semua peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membentuk masa depan yang berkelanjutan (UNESCO, 2022). Kualitas pendidikan di Indonesia masih merupakan topik diskusi serius, sebagaimana hasil data World Population Review menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ke-54 dari 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan pendidikan dunia.

Di Indonesia, pengembangan sektor pendidikan mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2007 yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Dalam periode awal pelaksanaan RPJPN, perhatian utama dalam pengembangan pendidikan adalah meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan sebagai penyelenggara layanan pendidikan, dengan fokus pada perluasan akses dan modernisasi proses pembelajaran. Pada periode berikutnya, pemerintah lebih menekankan pada perkuatan layanan pendidikan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saat ini, dalam periode ketiga, pembangunan pendidikan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang mempersiapkan

individu Indonesia untuk bersaing di tingkat regional. (Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025)

METODE

Metode yang dipergunakan dalam penelitian merupakan metode deskriptif kualitatif. Melalui penelitian deskriptif akan diperoleh gambaran mengenai pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kesempatan belajar secara merata sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Tahun 2020-2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta sumber publikasi lain yang relevan.

HASIL

SDGs sebagai Babak Baru Pembangunan

Istilah "pembangunan berkelanjutan" berarti banyak hal untuk banyak orang. Pertemuan Rio+20 resmi mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai tiga dimensi yang harus dikejar secara bersamaan yang terdiri dari: ekonomi, sosial, dan lingkungan (Clémençon, 2012). Pembangunan berkelanjutan dapat dikatakan sebagai penjajaran dari dua tujuan atau proses yang terpisah dan dapat dianggap sebagai suatu persamaan: Pengembangan berkelanjutan = pengembangan + keberlanjutan (Lele, 1991 dalam Sharples, 2010). Moldan & Dahl (2007) memberikan pemahaman bahwa pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai suatu pembangunan yang mampu mempertahankan terjadinya pembangunan itu sendiri menjadi tidak terbatas. Selanjutnya Boeren (2019) berpendapat bahwa pendidikan berperan sebagai 'mesin' yang kuat dalam mengembangkan masyarakat yang lebih kohesif dan setara, dimana pendidikan berkualitas juga meningkatkan *skills* yang berkaitan dengan pembelajaran untuk keberlanjutan.

Istilah Sustainable Development Goals (SDGs) pertama kali muncul sebagai agenda pembangunan global pada tahun 2012, diusulkan oleh pemerintah Kolombia, Peru, Guatemala, dan Uni Emirat Arab sebelum konferensi Rio+20. Konferensi PBB tahun 2012 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro pada bulan Juni menjadi momen kunci dalam perjanjian inisiatif pembangunan berkelanjutan global di masa depan. SDGs bukanlah rangkaian tujuan pertama yang dirancang PBB melalui UNESCO untuk mendukung negara-negara bekerja sama menciptakan dunia yang lebih bersih dan masyarakat global yang merata.

Sebelum adanya SDGs, terdapat Millenium Development Goals (MDGs) yang dirumuskan pada tahun 2000. MDGs mencakup delapan (8) tujuan yang diharapkan tercapai pada tahun 2015. Sasaran utamanya adalah mengeliminasi kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem, mencapai universalitas pendidikan dasar, meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesejahteraan ibu hamil, melawan penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta menggalakkan kerjasama global dalam pembangunan. Kemudian pada 1 Januari 2016, sebuah rancangan baru yang ambisius diluncurkan, yang mana tujuan yang ingin dicapai meningkat menjadi 17. Ketujuh belas tujuan tersebut bertemakan “pertumbuhan ekonomi, Pembangunan social [dan] perlindungan lingkungan”, yang lebih rinci dituangkan dalam 169 target. MDGs terutama ditargetkan pada negara-negara berkembang, sementara SDGs berfokus pada seluruh negara di dunia (Boeren, 2019). Selanjutnya pada tahun 2017, UNESCO menerbitkan *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*, yang menggambarkan perbedaan antara tujuan pembelajaran kognitif, sosio-emosional dan perilaku pada semua SDGs yang mengacu pada pengetahuan dan *skills* yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini, motivasi dan sikap yang mendasari, serta tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Unterhalter (2019) menyatakan bahwa diskusi mengenai perumusan tujuan dan target SDGs ini berlangsung dalam tiga tahun (2012-2015), kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai indikator pencapaian SDGs selama tiga tahun (2015-2018). Hasil diskusi UNESCO ini merumuskan 4 pilar pembangunan SDGs, yaitu Pembangunan sosial, nasional, ekonomi, serta hukum dan tata kelola. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini dimaksudkan untuk berdampak panjang hingga tahun 2030, dimana agendanya ialah kesepakatan pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan.

Pendidikan Berkualitas merupakan salah satu dari 5 target dalam kerangka SDGs yang terfokus pada Pilar Pembangunan Sosial, yang mana memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan peluang belajar sepanjang hidup bagi semua orang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, baik pria maupun wanita, memiliki kesempatan yang setara untuk menerima pendidikan yang berkualitas. Di Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007. Tujuannya adalah untuk mencapai kemajuan, kemandirian, dan keadilan bagi Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diupayakan agar seimbang, sehingga dapat menjamin keberlanjutan dalam pembangunan nasional. (UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025).

Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 4 di Indonesia

Implementasi MDGs di Indonesia telah menghasilkan perubahan positif, dengan beberapa kemajuan yang mencolok. Walaupun begitu, beberapa target MDGs masih memerlukan usaha ekstra untuk dapat tercapai terutama dalam sektor pendidikan, pemerintah telah berhasil mengurangi ketidaksetaraan gender di tingkat pendidikan tinggi, yang terlihat dari penurunan yang cukup besar pada rasio indikator Angka Partisipasi Murni (APM) antara perempuan dan laki-laki di SMA/MA/Paket C, mengalami penurunan dari tahun 1993 sebesar 93,67 persen hingga pada tahun 2011 sebesar 101,40 persen. (BAPPENAS, 2012).

Dimulainya SDGs sejak tahun 2015 menandai langkah ke arah pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meneruskan upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam MDGs. SDGs diharapkan akan menjadi agenda pembangunan yang memiliki kapasitas untuk mengatasi tantangan lama dan baru yang terus meningkat. SDGs diharapkan akan menjadi suatu rencana transformasi yang akan membentuk ulang perkembangan global untuk kepentingan generasi mendatang. Laporan (Kementerian PPN/Bappenas, n.d.) tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas mencatat bahwa kemajuan dalam mencapai SDGs 4 secara umum mengalami perkembangan positif, tetapi masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa berdasarkan hasil Pengukuran PISA (Programme for International Student Assessment) dan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), proporsi siswa yang mencapai tingkat kompetensi minimum dalam numerasi dan literasi masih rendah. Selain itu, partisipasi dalam pendidikan tinggi tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2019 dalam RPJMN 2019, hanya mencapai 30,28% dari target awal sebesar 36,73%. Partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non-formal juga masih rendah, dan persentase guru yang memiliki sertifikasi juga belum mencapai target yang diharapkan, yaitu 46,15% dari 77,2%.

Tantangan-tantangan yang masih dihadapi dalam mencapai SDGs 4 di Indonesia melibatkan aspek-aspek seperti akses pendidikan yang memadai, peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, penguasaan keterampilan, peluang pekerjaan, serta perkuatan dalam pendidikan satu tahun pra-sekolah. Kementerian PPN / BAPPENAS (2020) menerbitkan metadata indikator SDGs Indonesia Edisi II sebagai bentuk kajian ulang pelaksanaan SDGs edisi pertama dan perumusan perencanaan untuk lima tahun selanjutnya yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan merujuk pada perubahan yang diumumkan oleh Kantor Statistik PBB (UN-STAT), jumlah indikator SDGs awalnya adalah 214 pada tahun 2016, kemudian meningkat menjadi 247 pada bulan April 2020. Seiring dengan perubahan ini, Indikator SDGs Indonesia juga mengalami

peninjauan ulang dan menghasilkan Indikator SDGs Edisi II yang terdiri dari 289 indikator, menggantikan Edisi I yang mencakup 319 indikator sebelumnya. Lampiran Rencana Aksi Nasional yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/ BAPPENAS (2021) menetapkan target SDGs 4 sesuai dengan Prioritas Nasional serta program prioritas RPJMN 2020-2024 yaitu Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing (Prioritas Nasional 3), Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (Prioritas Nasional 4), dan Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (Prioritas Nasional 7).

Berdasarkan data dari (Badan Pusat Statististik (BPS), 2022) pencapaian tujuan Pendidikan Berkualitas pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2022 di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1 dengan beberapa indikator yang dianalisa. Angka kelulusan SD terus mengalami peningkatan di 3 tahun terakhir yaitu sebesar 1,31% pada tahun 2021 dan 0,45% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Angka lulusan pendidikan tingkat menengah (SMP dan SMA) juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana terlihat terdapat peningkatan sebesar 0,99% (angka lulusan SMP) dan 1,99% (angka lulusan SMA) pada tahun 2021 dan peningkatan sebesar 1,25% (angka lulusan SMP) dan 2,81% untuk angka lulusan SMA pada tahun 2022. Partisipasi pra-sekolah juga mengalami peningkatan sebesar 2,38% pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021 sebesar 0,03% dari tahun sebelumnya, 2020. Indikator SDGs4 lainnya juga mengalami peningkatan di tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020-2022, diantaranya pada indikator angka melek huruf, proporsi remaja dan dewasa (15-24 tahun) dengan keterampilan TIK, serta Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi.

Pencapaian dari masing-masing indikator tujuan pembangunan pendidikan dari SDGs tersebut masih belum memenuhi harapan meskipun ada beberapa indikator yang meningkat, namun belum sesuai dengan target yang ingin dicapai. Secara umum tingkat penyelesaian pendidikan meningkat untuk semua jenjang, namun semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat penyelesaian sekolah. Hal ini juga tercermin dari APK Perguruan tinggi yang masih sangat rendah. Angka lulusan SD dan SMP belum mencapai 100% dan angka lulusan SMA masih dibawah 70%, sehingga dapat disimpulkan bahwa program wajib belajar 12 tahun belum tercapai maksimal.

Pencapaian tujuan pendidikan berkualitas berdasarkan jenis kelamin (*gender*) secara terinci terlampir pada Gambar 2. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2022 dapat terlihat bahwa *the 2030 Agenda for SDGs* sudah berjalan dengan baik, dimana kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dengan prinsip-prinsip

universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. Proporsi perempuan dan laki-laki dalam mengenyam pendidikan hampir sama besar, bahkan sedikit lebih besar dalam mengakses pendidikan pendidikan dasar hingga menengah, bahkan presentase penduduk perempuan yang mengikuti pendidikan tinggi lebih tinggi 4,64% dibandingkan penduduk laki-laki. Namun demikian Angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun keatas belum maksimal, dimana proporsi perempuan yang buta huruf lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Badan Pusat Statistik mengindikasikan bahwa Angka Melek Huruf (AMH) mencerminkan hasil dari pendidikan dasar dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sebagai penilaian efektifitas sistem pendidikan dasar. Diharapkan pencapaian SDGs khususnya pembangunan pendidikan dapat terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Strategi untuk Mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Membangun Pendidikan yang Berkualitas dan Kesempatan Belajar secara Merata di Indonesia

Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut bahwa melalui pemerataan akses dalam pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, warga Indonesia akan memperoleh keterampilan hidup (*life skills*) yang diperlukan, yang kemudian akan mendukung perkembangan manusia yang holistik, serta membentuk masyarakat yang demokratis dan modern dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila.

Selama periode tahun 2000-2015, telah terjadi sejumlah upaya dan perubahan signifikan dalam perkembangan pendidikan dalam rangka pencapaian MDGs. Beberapa pencapaian yang sangat penting telah dicapai, seperti pelaksanaan Undang-Undang tentang guru dan dosen, penetapan standar nasional pendidikan, sertifikasi guru, dan juga pemberian tunjangan profesi. Namun, masih terdapat sejumlah kelemahan dan hasil yang belum sepenuhnya memuaskan dari berbagai upaya tersebut. Untuk itu rencana strategis *Sustainable Development Goals* (SDGs) diharapkan menjadi terobosan baru khususnya pembangunan pendidikan, sehingga mampu memperbaiki, meningkatkan serta membawa perubahan positif bagi kesejahteraan manusia dan lingkungannya.

Landasan hukum rencana strategis *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam bidang pendidikan sebagai perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, Pasal 17, Pasal 34.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- Perpres No.111 Tahun 2022 tentang SDGs
- Lampiran Perpres No.59 Tahun 2017 tentang SDGs
- Peraturan Menteri No.7 Tahun 2018 tentang Pedoman Rencana Aksi Nasional (RAN)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024
- Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs 2021-2024
- Keputusan Menteri No.127 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja

Tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar bercita-cita memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada semua penduduk Indonesia dengan tingkat partisipasi yang tinggi di semua tingkat pendidikan, hasil pembelajaran yang unggul, serta mutu pendidikan yang merata, baik dari segi geografis maupun status sosial ekonomi. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan SDGs dalam membangun mutu pendidikan dan kesempatan belajar secara merata sebagaimana terperinci dalam (Lampiran Rencana Strategis 2020-2024 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020)). Pemerintah menyusun beberapa langkah strategis yang berfokus pada tiga tujuan utama yaitu optimalisasi angka partisipasi pendidikan; peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan; serta meningkatkan relevansi pendidikan. Dalam rangka mencapai tujuan optimalisasi angka partisipasi pendidikan, pemerintah berfokus pada Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan tinggi, begitupun dengan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun yang masih belum maksimal hingga saat ini. Kondisi yang ingin dicapai pemerintah dalam tujuan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas dan mutu layanan institusi pendidikan, mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi, namun juga kualitas manajerial institusi pendidikan mulai dari pengawas, kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, hingga peran terhadap masyarakat dan dunia usaha/ dunia industri (DU/DI). Peningkatan jumlah institusi perguruan tinggi dan pemerataan TIK dalam mendukung

peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan vokasi dalam mendukung Revolusi Industri 4.0 juga tak luput dari fokus tujuan pemerintah. Selain itu dalam tujuan peningkatan relevansi pendidikan, pemerintah ingin melakukan pencapaian dalam peningkatan kemampuan literasi dan numerasi serta peningkatan layanan pendidikan dan relevansi di pendidikan vokasi baik tingkat menengah hingga pendidikan tinggi hingga menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi di DU/DI.

DISKUSI

Pembangunan berkualitas dan kesempatan belajar yang merata sebagai salah satu tujuan SDGs masih menjadi perhatian banyak pihak. Tujuan pendidikan dan target-target yang disusun dalam program SDGs diharapkan melebihi program yang dijanjikan MDGs mengenai pendidikan dasar dan kesetaraan *gender*, dimana perbedaan paling mendasar ialah seluruh negara turut berkomitmen dalam mencapai tujuan ini (Antonia Wulff, 2020). Indonesia terus mengalami perkembangan yang positif dalam implementasi SDGs 4, meskipun masih menemui beberapa tantangan dan peningkatan kedepannya (Nurfatimah et al., (2022); Rulandari, (2021)). Laporan Kemeterian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS (2021) mencatat melalui program *SDGs Bond*, beasiswa pendidikan telah diberikan bagi 10,4 juta anak SD dan 1 juta siswa SD Islam yang menjangkau pelajar di 34 provinsi, termasuk 9,4ribu daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Meski demikian, jika dibandingkan negara tetangga, tingkat pendidikan Indonesia masih tergolong rendah. Masalah utamanya ialah distribusi kualitas yang belum merata. Hal ini didukung dengan pernyataan (Safitri et al., 2022) bahwa beberapa provinsi hingga saat ini belum melaksanakan strategi SDGs dan menghadapi sejumlah tantangan seperti masalah infrastruktur, perbedaan budaya, tingkat kompetensi, dan kualitas guru yang masih rendah di daerah-daerah terpencil. (Kemeterian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS, 2021) juga mencatat sebesar guru dengan kualifikasi S1/D4 masih sebanyak 73,17% dan guru yang memiliki sertifikat pendidik hanya sebanyak 25,76%. Data ini menunjukkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan memerlukan peningkatan kualitas tenaga pendidik sehingga tercapai tujuan0tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan

KESIMPULAN

Kemajuan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, terutama dalam konteks pembangunan pendidikan, karena masih ada

banyak aspek yang memerlukan perbaikan dan peningkatan. Beberapa strategi yang telah direncanakan pemerintah untuk meningkatkan SDGs yang diharapkan dapat bersaing dengan pembangunan negara lain secara global. Beberapa strategi yang telah direncanakan hendaknya diimplementasikan secara bertahap, berkesinambungan dan diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dievaluasi pencapaiannya secara berkala sehingga diharapkan pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kesempatan belajar merata di seluruh daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia melalui berbagai aksi nyata yang tertuang dalam 25 program Kurikulum Merdeka: Merdeka Belajar dengan turut melibatkan berbagai sektor, dimana tidak hanya pemerintah, namun juga guru, peserta didik, sektor swasta, bahkan masyarakat sendiri juga dilibatkan untuk turut berperan aktif (Kemendikburistek, 2021). Indonesia masih memiliki waktu 7 (tujuh) tahun untuk mengejar ketertinggalan dalam mewujudkan The 2030 Agenda yang telah menjadi kesepakatan pembanguna berkelanjutan dunia.

REFERENSI

- Antonia Wulff. (2020). *Grading Goal Four: Tensions, Threats, and Opportunities in the Sustainable Development Goal on Quality Education* (Antonia Wulff, Ed.). Koninklijke Brill NV.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). *Statistik Pendidikan*.
- BAPPENAS. (2012). *Bappenas*.
- Boeren, E. (2019). Understanding Sustainable Development Goal (SDG) 4 on “quality education” from micro, meso and macro perspectives. *International Review of Education*, 65(2), 277–294. <https://doi.org/10.1007/s11159-019-09772-7>
- Charles Hopkins, & Rosalyn McKeown. (2002). Education for Sustainable Development: An International Perspective. In Daniella Tibury, Robert B. Stevenson, John Vien, & Danie Schreuder (Eds.), *Education and Sustainability: Responding to The Global Challenge* (pp. 13–24). IUCN.
- Cléménçon, R. (2012). Welcome to the Anthropocene: Rio + 20 and the Meaning of Sustainable Development. *Journal of Environment & Development*, 21(3), 311–338. <https://doi.org/10.1177/1070496512457289>
- Desi Pristiwanti, Bai Badariah, Sholeh Hidayat, & Ratna Sari Dewi. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 7911–7915. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9498>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Rencana Strategis 2020-2024*.
- Kementerian Pendidikan, K. R. dan T. (2021). *Merdeka Belajar*. <http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/>
- Kementerian PPN / BAPPENAS. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia*. <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Kementerian PPN/ BAPPENAS. (2021). *Rencana Aksi Nasional SDGs 2021-2024*.
- Kementerian PPN/Bappenas. (n.d.). *Pelaksanaan Pencapaian SDGs Indonesia 2019*.

- Kemeterian Perencanaan Pembangunan Nasiona (PPN) / BAPPENAS. (2021). *LAPORAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN TPB/SDGs TAHUN 2021*.
- Moldan, B., & Dahl, A. (2007). *Meeting Conceptual Challenges dalam Hak T, Moldan B, Dahl AL (Ed.) Sustainability Indicators: A Scientific Assessment. Scientific Committee on Problem of the Environment (SCOPE)*.
- Nurfatimah, S. A., Hasna, S., & Rostika, D. (2022). Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6145–6154. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3183>
- Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Model Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development/ESD) melalui Kegiatan Intrakurikuler* (pp. 1–30).
- Rulandari, N. (2021). Study of Sustainable Development Goals (SDGS) Quality Education in Indonesia in the First Three Years. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2702–2708. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1978>
- Safitri, A. O., Yunianti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096–7106. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296>
- Sharpley, R. (2010). Tourism and Sustainable Development: Exploring the Theoretical Divide. *Journal of Sustainable Tourism*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/09669580008667346>
- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (n.d.).
- UNESCO. (2012). UNESCO and Sustainable Development.
- United Nations. (2014). Delivering the Post-2015 Development Agenda. In *United Nations*.
- Unterhalter, E. (2019). The Many Meanings of Quality Education: Politics of Targets and Indicators in SDG4. *Global Policy*, 10, 39–51. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12591>
- UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.